**LITERATURE REVIEW
AGENDA SETTING DALAM KEBIJAKAN PUBLIK:**

**ANALISIS TINGKAT PENGANGURAN TERBUKA DAN TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIATAHUN 2025**

**OLEH**

**ANDRE YUSFIAN**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**2025**

# BAB I

## LATAR BELAKANG

**1. 1 KEBIJAKAN ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN TINGKAT KEMISKINAN**

 Indonesia, sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, terus berupaya untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam peta perjalanan pembangunan tersebut, dua indikator makroekonomi yang menjadi tolok ukur fundamental sekaligus tantangan berkelanjutan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kemiskinan. Kedua indikator ini tidak hanya merefleksikan kesehatan perekonomian suatu bangsa, tetapi juga menjadi barometer kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat.

Periode menuju tahun 2025 memiliki signifikansi strategis yang tinggi. Tahun ini merupakan tahun penutup implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025, di mana pemerintah telah menetapkan target-target ambisius, termasuk penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Namun, jalan menuju target tersebut diwarnai oleh kompleksitas tantangan kontemporer. Disrupsi teknologi yang memicu transformasi pasar tenaga kerja, ketidakpastian ekonomi global, dan lanskap politik domestik pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 menciptakan lingkungan yang dinamis dan penuh ketidakpastian.

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan memiliki hubungan yang bersifat simbiosis dan saling memperkuat (interlinked cycle). Pengangguran yang tinggi menyebabkan hilangnya pendapatan rumah tangga, yang pada gilirannya mendorong masyarakat ke dalam jurang kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan seringkali membatasi akses individu terhadap pendidikan dan keterampilan yang berkualitas, sehingga menjebak mereka dalam lingkaran pengangguran struktural. Pada tahun 2025, dinamika ini diperkirakan akan semakin kompleks dengan memasuki era pascapandemi dan ekonomi digital, yang menuntut kompetensi baru tenaga kerja sekaligus berpotensi meminggirkan kelompok pekerja yang tidak mampu beradaptasi.

Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kedua isu ini pada tahun 2025 menjadi sebuah keniscayaan. Pemahaman yang komprehensif tidak hanya diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan, tetapi lebih dari itu, untuk memahami bagaimana kedua masalah krusial ini dapat diangkat ke dalam agenda kebijakan publik prioritas pemerintah. Proses agenda setting ini akan menentukan apakah isu pengangguran dan kemiskinan mendapatkan alokasi sumber daya dan perhatian politik yang memadai untuk ditangani secara serius.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulisan ini dilakukan untuk menganalisis prospek Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2025 serta proses agenda settingnya dalam kerangka kebijakan publik.

**1.2 FAKTOR TINGKAT PENGANGURAN TERBUKA**

Pengangguran tidak hanya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi tetapi juga berdampak secara langsung pada kesejahteraan individu dan keluarga. Dalam kaitannya dengan pengangguran, faktor-faktor seperti pendidikan dan indeks pembangunan manusia memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kemiskinan di Indonesia (Pratama & Citra, 2019). Tingkat pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh dalam menentukan kesempatan kerja dan penghasilan setiap individu. Pendidikan tinggi cenderung dapat meningkatkan inovasi seseorang dalam hal keterampilan dan kualitas hidup seseorang, sehingga membuka peluang akses terhadap pekerjaan yang lebih baik. Namun, jika dilihat di beberapa wilayah Indonesia kesenjangan pendidikan masih menjadi masalah serius. Banyak daerah terutama di pedesaan dan daerah terpencil yang masih memiliki akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas, tingkat putus sekolah juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan, karena dapat meningkatkan risiko kemiskinan (Adhitya dalam Prabawa & Kencana, 2022) Selain pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi indikator penting dalam menganalisis kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup beberapa aspek kesejahteraan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Di Indonesia, peningkatan IPM sering dikaitkan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Namun, masih ada ketimpangan yang signifikan terhadap daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa aspek pembangunan manusia, tantangan besar masih harus diatasi untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik dalam akses terhadap sumber daya (Budhijana, 2020)

**1.3 TINJAUAN TEORITIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP TINGKAT PENGAGURAN TERBUKA**

**Pengangurang terbuka** didefinisikan sebagai bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator makroekonomi krusial yang mencerminkan kesehatan perekonomian suatu negara. Tingginya TPT tidak hanya merupakan masalah ekonomi (hilangnya output potensial, menurunnya pendapatan pajak) tetapi juga masalah sosial (kemiskinan, ketimpangan, dan potensi konflik sosial). Pemakaian tenaga kerja lebih dari seperti biasanya dapat mendorong output melebihi output potensialnya. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Hubungan negatif antara kesenjangan output riil dengan output potensial terhadap pengangguran digambarkan oleh Okun’s Law (Hashmi et al., 2021) Peran human capital atau modal manusia merupakan elemen fundamental dalam pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan individu. Dalam konteks organisasi, human capital menjadi aset krusial yang menentukan kesuksesan dan keunggulan kompetitif. Human capital mencakup pengetahuan, keterampilan, bakat, kemampuan, nilai-nilai, dan sikap yang secara kolektif dikontribusikan oleh individu terhadap produktivitas dan kinerja organisasi (Coleman et al., 2004; Weber & Reynolds, 2010) agar pertumbuhan ekonomi yang meningkat menghasilkan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan memotivasi pekerja untuk bekerja lebih lama, yang mengarah pada keberhasilan dalam pembangunan ekonomi (Kaufman & Hotchkiss, 2000) Menurut teori upah efisiensi (efficiency wage), upah yang tinggi dapat membuat pekerja lebih produktif. Oleh karena itu, upah dapat digunakan sebagai pendorong produktivitas serta motivasi dan memperkuat hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja (Mankiw, 2007).

# BAB II. FORMULASI KEBIJAKAN DAN PROSES AGENDA SETTING

## 2.1 Model dan Teori Agenda Setting dalam Kebijakan Publik

Proses Agenda Setting kepada analisis tingkat pengaguran dan tingkat kemiskinan dapat dijelaskan melalui lima teori utama. Pertama hokum okun Hukum Okun mendeskripsikan hubungan empiris yang teramati antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi (Pertumbuhan PDB). Hukum ini menyatakan bahwa ketika pertumbuhan PDB melambat di atas trennya (output gap negatif), tingkat pengangguran akan meningkat, dan sebaliknya.( Arthur Okun, 1962)  pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang dimiliki individu (modal manusia) adalah bentuk investasi. Investasi ini meningkatkan produktivitas dan kapasitas penghasilan seseorang di pasar tenaga kerja.( Gary Backer dan Theodore Schults, 1960 ) Pengangguran sering kali merupakan masalah bagi mereka yang terdampar di sektor sekunder atau mencoba berpindah dari sekunder ke primer,(Michael J. Piore, 1970) kemiskinan dan keterbelakangan di negara "pinggiran" (Negara Dunia Ketiga) sebagai konsekuensi langsung dari eksploitasi historis dan ekonomi oleh negara "pusat" (negara maju). Negara pinggiran sengaja dijaga agar tetap tergantung dan menyediakan bahan mentah serta tenaga kerja murah.(Andre Gunder Frank, 1970) **Pekerja miskin** (working poor)—individu yang bekerja tetapi tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh upah yang rendah, jam kerja yang tidak menentu, dan tidak adanya jaminan sosial.( David K shipler, 2023).

## 2.2 Implementasi dan Aktor Agenda Setting pada Analisis tingkat pengangguran

Tahap implementasi kebijakan tingkat penganguran terbuka memperlihatkan keterlibatan berbagai aktor dan jaringan kebijakan, Media dan aktor lain secara aktif membingkai hubungan antara pengangguran dan kemiskinan.(Robert Entman, 1993). Terdapat banyak data dan indikator tentang pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT) dan kemiskinan (Garis Kemiskinan, Gini Ratio). Proses gatekeeping menentukan data mana yang paling ditonjolkan,(David Manning White,1950). pengangguran-kemiskinan didorong dari sekadar perbincangan publik (public agenda) menjadi sesuatu yang harus ditangani secara formal oleh pemerintah (policy agenda). Media berperan sebagai jembatan dengan terus-menerus meliput dampak sosial dari kedua isu ini.(Roger Cob dan Charles Elder, 1971) Media dan aktor politik menciptakan dan menyebarkan "simbol" atau "istilah" yang dengan cepat mengonvergensikan dua isu yang berbeda (pengangguran & kemiskinan) menjadi satu masalah yang mudah dipahami publik.( Ernest Borman,1972). media "elit" atau otoritatif sering kali memimpin dalam menetapkan kerangka analisis, yang kemudian diikuti oleh media-media lain,(EveretM. Roger & James W Dearing, 1988)

**KESIMPULAN**

Proses Agenda Setting kepada analisis tingkat pengaguran dan tingkat kemiskinan dapat dijelaskan melalui lima teori utama. Pertama hokum okun Hukum Okun mendeskripsikan hubungan empiris yang teramati antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi (Pertumbuhan PDB). Hukum ini menyatakan bahwa ketika pertumbuhan PDB melambat di atas trennya (output gap negatif), tingkat pengangguran akan meningkat, dan sebaliknya.( Arthur Okun, 1962)  pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang dimiliki individu (modal manusia) adalah bentuk investasi. Investasi ini meningkatkan produktivitas dan kapasitas penghasilan seseorang di pasar tenaga kerja.( Gary Backer dan Theodore Schults, 1960 ) Pengangguran sering kali merupakan masalah bagi mereka yang terdampar di sektor sekunder atau mencoba berpindah dari sekunder ke primer,(Michael J. Piore, 1970) kemiskinan dan keterbelakangan di negara "pinggiran" (Negara Dunia Ketiga) sebagai konsekuensi langsung dari eksploitasi historis dan ekonomi oleh negara "pusat" (negara maju.

*DAFTAR PUSTAKA*

1. Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.
*(Merujuk pada Gary Becker dan Theodore Schultz yang mengembangkan teori Human Capital)*.
2. Cobb, R. W., & Elder, C. D. (1971). The politics of agenda-building: An alternative perspective for modern democratic theory. *The Journal of Politics, 33*(4), 892-915.
*(Teori mengenai public agenda dan policy agenda)*.
3. Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication, 43*(4), 51-58.
*(Teori pembingkaian/framing)*.
4. Frank, A. G. (1966). The development of underdevelopment. *Monthly Review, 18*(4), 17-31. *(Teori ketergantungan/ Dpendency Theory)*.
5. Kaufman, B. E., Hotchkiss, J. L. (2000). *The economics of labor markets* (5th ed.). The Dryden Press.
*(Membahas hubungan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja)*.
6. Mankiw, N. G. (2007). *Macroeconomics* (6th ed.). Worth Publishers.
*(Sumber teori upah efisiensi/ efficiency wage theory)*.
7. Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its measurement and significance. *Proceedings of the Business and Economic Statistics Section*, American Statistical Association, 98-104.
*(Sumber asli Hukum Okun)*.
8. Piore, M. J. (1970). Jobs and training. In S. Beer & R. Barringer (Eds.), *The state and the poor* (pp. 53-83). Winthrop Publishers.
*(Teori segmentasi pasar tenaga kerja/ dual labor market theory)*.
9. Rogers, E. M., & Dearing, J. W. (1988). Agenda-setting research: Where has it been, where is it going? In J. A. Anderson (Ed.), *Communication yearbook 11* (pp. 555-594). Sage.
*(Membahas peran media elit dalam agenda setting)*.
10. Shipler, D. K. (2004). *The working poor: Invisible in America*. Alfred A. Knopf.
*(Konsep "working poor")*.
11. White, D. M. (1950). The "gate keeper": A case study in the selection of news. *Journalism Quarterly, 27*(4), 383-390.
*(Teori gatekeeping)*.
12. Budhijana, I. W. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15*(2), 123-135.
*(Sumber nasional mengenai IPM dan kemiskinan)*.
13. Coleman, J. S., et al. (2004). *The concept of human capital in the knowledge economy*. Journal of Economic Perspectives, 18(3), 131-152.
*(Definisi human capital dalam konteks organisasi dan ekonomi)*.
14. Hashmi, A. G., et al. (2021). Revisiting Okun's Law in the Context of COVID-19: Evidence from Asian Economies. *Journal of Asian Economics, 74*, 101303.
*(Studi empiris terkini tentang Hukum Okun)*.
15. Prabawa, K. S., & Kencana, I. N. (2022). Dampak Tingkat Putus Sekolah dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 12*(1), 45-60.
*(Mengutip pernyataan Adhitya tentang putus sekolah dan kemiskinan)*.
16. Pratama, Y. J., & Citra, D. A. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 10*(2), 89-104.
*(Sumber awal tentang pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan)*.
17. Weber, M. R., & Reynolds, N. S. (2010). The value of human capital: A review of conceptual and empirical studies. *Journal of Business and Psychology, 25*(3), 381-393.
*(Membahas nilai dan kontribusi modal manusia*
18. Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Keadaan Ketengakerjaan Indonesia Agustus 2023*. BPS RI.
*(Sumber data resmi TPT)*.
19. Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. BPS RI.
*(Sumber data resmi kemiskinan)*.
20. Kementerian PPN/Bappenas. (2019). \*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025\*. Republik Indonesia.
*(Sumber kebijakan utama yang menjadi konteks tulisan)*.